

## PERAN LUMBUNG DESA MODERN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Oleh:  
Agung Wibowo\*

### ABSTRACT

*Countryside mow is a house to keep society's paddy. All of society has the same rights to use countryside mow. The basic values of countryside mow is: trust, togetherness, transparency, and democracy. Along the nun of time, the existence of countryside mow is to be lost. The pressure of colonial cause this. Start from, the modern countryside mow is developing now. The countryside mow development is aim to society powered in the case of controlling shell of rice price.*

*The modern is the best choice and competent to be government's expectation. The modern countryside mow as saving and loan institute in countryside will be alternative for society to answering the demand of food when dry season. Beside this, the countryside mow is pioneer of credit institute, that begining of Badan Kredit Desa (Countryside Credit Institute). Countryside Credit Institut is pioneer of Micro Monetary Institute.*

Keywords : shell of rice , countryside mow, indogenous technology, Powered.

### PENDAHULUAN

Lumbung Desa adalah sebuah rumah (gudang) untuk menyimpan padi milik seluruh warga desa. Setiap kali panen, warga wajib menyisihkan sebagian hasil panen padinya untuk disimpan di "Lumbung Desa". Semua warga desa mempunyai hak yang sama terhadap pemanfaatan lumbung tersebut. Nilai-nilai yang melandasi lumbung desa adalah: *trust*, kebersamaan, transparansi, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut

merupakan modal sosial (*social capital*) yang dimiliki masyarakat desa sejak zaman nenek moyang. Sebagai salah satu elemen yang terkandung dalam masyarakat sipil, modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh sebagian besar anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat.

Robert Putnam (dalam Mefi dan Hesti, 2003) mendefinisikan

\*Dosen pada Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Fakultas Pertanian UNS

modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks* ("*networks of civic engagement*") - ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Dove (1985) bahwa budaya tradisional atau budaya lokal (dalam hal ini adalah "Lumbung Desa") merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Hal ini berarti budaya tradisional tidak bertentangan dengan pembangunan, karena selalu mampu melakukan penyesuaian dengan baik terhadap kondisi lokal.

Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan penganut teori modernisasi. Bellah sebagai murid Parsons menegaskan pada dasarnya masyarakat sepenuhnya mendasarkan diri pada nilai-nilai ekonomi, seperti rasionalisasi, universalitas dan nilai-nilai berprestasi, McClelland menyarankan agar negara dunia ketiga mengembangkan dirinya untuk memiliki nilai-nilai kebutuhan berprestasi untuk menumbuhkan kaum wiraswatawan modern. Selanjutnya Lipset dengan tegas menyarankan agar negara dunia

ketiga mengikuti gaya pembangunan ekonomi barat (Suwarsono dan Alvin Y So, 1991). Dengan demikian menurut teori modernisasi nilai-nilai tradisional harus diganti dengan nilai-nilai ekonomi untuk mempercepat pembangunan.

Akibat yang terjadinya dengan modernisasi, keberadaan "Lumbung Desa" seiring dengan berjalannya waktu menjadi hilang karena adanya kekuatan penekan yang sangat kuat terhadap warga desa, yaitu kaum kolonial. Pihak kolonial melarang warga desa menyerahkan hasil panen mereka ke "Lumbung Desa," dan memaksa mereka untuk menyerahkannya ke gudang kolonial. Akibatnya, konsep "Lumbung Desa" yang luhur ini menjadi sirna. Dengan kata lain nilai-nilai luhur yang melandasi "Lumbung Desa" itu pernah ada di masyarakat dan sekarang mati. Hal ini tentu menarik untuk diteliti mengapa nilai-nilai itu mati dan bagaimana cara menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah mati tersebut.

Selanjutnya menurut pandangan kaum strukturalis, terlaksananya suatu proses pembangunan dilandasi oleh dua komponen utama, yaitu : 1) adanya suatu etika produksi yang melibatkan banyak orang dan proses alokasi sumber-sumber ekonomi yang ditentukan oleh kaidah optimasi sosial dan 2) adanya suatu struktur kekuasaan yang menempatkan rakyat sebagai *political masters* dalam sistem politik sehingga rakyat banyak mempunyai kekuatan politik untuk melindungi kepentingannya dan

memperjuangkan aspirasinya (Sritua Arif, 1993). Ini berarti untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur diperlukan penguatan struktur masyarakat, dalam hal ini adalah "Lumbung Desa". Oleh karena itu menurut pandangan kaum strukturalis keberadaan "Lumbung Desa" harus ditumbuhkembangkan.

Dengan demikian menurut pandangan Strukturalis "Lumbung Desa" merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berakar pada nilai budaya, selain mampu mengembangkan sistem distribusi hasil panen yang dirasakan adil oleh masyarakat juga mampu mencegah munculnya kesenjangan ekonomi yang berlebihan, meminimalkan kecemburuan sosial, mencegah pencurian dan memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati melalui berbagai mekanisme adat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat, pengembangan "Lumbung Desa Modern" merupakan salah satu pilihan terbaik dan patut dijadikan harapan bagi pemerintah di masa mendatang. "Lumbung Desa Modern" sebagai lembaga pengelola simpan pinjam gabah di desa misalnya, akan merupakan sebuah alternatif bagi masyarakat desa untuk sumber mencukupi kebutuhan pangan, terutama saat paceklik atau kebutuhan yang mendesak.

Selain itu keberadaan Lumbung Desa merupakan perintis perkreditan yang ada di pedesaan, yang mengawali munculnya Badan Kredit Desa. Badan Kredit Desa boleh dikatakan sebagai tonggak sejarah berdirinya lembaga

keuangan mikro di Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan untuk tidak memperkuat kelembagaan "Lumbung Desa Modern" dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

## PERMASALAHAN

Generasi muda sekarang tampaknya tidak begitu mengenal apa itu "Lumbung Desa," hal ini karena kurangnya perhatian pemerintah untuk berupaya mengembangkannya. Padahal jika melihat faedah atau manfaatnya, terbukti sangat besar dan jika membuka kembali sejarah ke belakang, terbukti pula bahwa jumlah lumbung desa di negeri ini sangatlah banyak jumlahnya

Keberadaan Lumbung Desa dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah saat ini mulai berusaha menumbuhkembangkan kembali kehadirannya dengan penanganannya yang lebih profesional. Demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang dinamis, pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Pemerintah harus berkoordinasi secara lintas sektor dan lintas departemen serta masyarakat luas, agar mereka benar-benar mampu berpartisipasi mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya pemerintah juga aktif melakukan penyuluhan dengan memberikan berbagai informasi agar mengetahui tujuannya secara jelas dan pasti pula manfaatnya.

## LUMBUNG DESA

Menurut Soerjono Soekanto (1990) lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan

perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.

Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit satu fungsional. Salah satu contoh lembaga kemasyarakatan di Indonesia adalah "Lumbung Desa."

Sejarah "Lumbung Desa" di Indonesia dimulai pada tahun 1902, ketika seorang residen di Jawa Barat mendirikannya di Cirebon dan Sumedang yang selanjutnya ternyata mengalami perkembangan pesat sampai ke luar Jawa. Data pada akhir bulan September tahun 1940, khusus di Jawa tercatat jumlah lumbung desa ada 5.451 buah yang masing-masing di wilayah Jawa Barat sebanyak 1.485 buah, Jawa Tengah 2.384 buah dan di Jawa Timur 1.582 buah (Tony Luqman Lutony, 2005).

Lumbung Desa merupakan salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berakar pada nilai budaya, selain mampu mengembangkan sistem distribusi hasil panen yang dirasakan adil oleh masyarakat juga mampu mencegah munculnya kesenjangan ekonomi yang berlebihan, meminimalkan kecemburuan sosial, mencegah pencurian dan memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati melalui berbagai mekanisme adat. Para petani mengumpulkan sebagian hasil panennya untuk digabungkan dengan hasil panen petani-petani lain untuk dijadikan persediaan di musim mendatang. Selain itu cara penyimpanan di lumbung desa ini juga untuk menghindari kemerosotan harga jual padi, apabila harga padi rendah hasil panen disimpan terlebih dahulu

setelah harganya tinggi, petani bisa menjualnya. Cara ini bisa menutup biaya usahatani, jangan sampai harga jual hasil panen lebih kecil daripada biaya karena akan menyebabkan kerugian bagi petani. Dari penyimpanan di "Lumbung Desa" petani dapat mengurangi hutangnya.

Aturan main "Lumbung Desa" ini sangat sederhana yakni *pertama*, bagi warga desa miskin, mereka berhak mengambil padi dalam jumlah tertentu tanpa harus menggantinya. *Kedua*, bagi warga yang mampu, juga berhak mengambil padi dari lumbung, tetapi mereka wajib menggantinya dengan jumlah yang sama. *Ketiga*, kunci lumbung desa dipegang oleh lurah (kepala desa) dan wewenang pemanfaatan lumbung diserahkan kepada rembug warga desa.

Berangkat dari budaya lokal yang sudah ada sejak jaman nenek moyang, kini mulai dikembangkan "Lumbung Desa Modern". Pengembangan Lumbung Desa dimaksudkan untuk memberdayakan petani dalam mengatasi gejolak harga gabah. Sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif Lumbung Desa dikelola secara professional tanpa menghilangkan nilai-nilai partisipatif. Hal ini bertujuan untuk : 1) mengintegrasikan subsistem produksi dan pasar, sehingga menjamin adanya kepastian harga produk tanaman pangan yang dapat memperbaiki pendapatan petani, 2) memasyarakatkan dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk tanaman pangan dan ketahanan pangan, 3) mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk mengembangkan agribisnis tanaman pangan (Departemen Pertanian, 2005).

Selanjutnya “Lumbung Desa Modern” harus mampu mewujudkan keberdayaan dan kemandirian petani di dalam pengelolaan agribisnis padi secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu “Lumbung Desa Modern” dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi antara lain, sebagai berikut :

- a. Memperpanjang masa penjualan gabah dan secara bersamaan meningkatkan akses petani kepada sumber-sumber permodalan dan lembaga keuangan.
- b. Memberikan kepastian nilai minimum dari gabah/beras yang disimpan dalam “Lumbung Desa Modern” yang selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan menjadi agunan.
- c. Membantu peran pemerintah dalam stabilisasi harga beras.
- d. Meningkatkan manajemen pengelolaan Lumbung Desa Modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan petani dalam melakukan penundaan penjualan beras.
- e. Meningkatkan pendapatan petani (Departemen Pertanian, 2005).

### EKONOMI KERAKYATAN

Pada dasarnya ekonomi rakyat sudah dikemukakan oleh Bung Hatta jauh sebelum Clifford Geertz memformulasikan tesis pada tahun 1963. Bung Hatta telah menghayati suatu persepsi yang kukuh bahwa ekonomi rakyat Indonesia, yaitu unit-unit ekonomi serba kecil termasuk pemberi jasa dalam proses produksi, yaitu kaum buruh, terus berada dalam posisi antara hidup dan mati. Oleh karenanya membicarakan ekonomi kerakyatan selalu mengandung

pendekatan strukturalis, pendekatan strukturalis yaitu pendekatan yang menyangkut dimensi-dimensi yang lebih luas dalam konstelasi kemasyarakatan sebagai suatu konstelasi peninggalan feodalisme dan kolonialisme (Sritua Arif, 2002).

Ekonomi rakyat sering diartikan sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang sedang berkembang dengan kondisi yang inferior dibanding ekonomi maju. Ekonomi rakyat ditandai dengan perekonomian rakyat kecil sebagai pelaku ekonomi dengan pemilikan asset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah, sehingga keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan tidak optimal dan menjadikan perbedaan (kesenjangan) diantara pelaku ekonomi yang maju dengan produktivitas tinggi (Gunawan Sumodiningrat, 1997).

Sebelum mengemukakan pemikirannya mengenai pemecahan masalah ekonomi Indonesia, Bung Hatta menggunakan peralatan dialektika hubungan ekonomi antar berbagai aktor ekonomi di dalam masyarakat. Hatta (dalam Sritua Arif, 1999) mengemukakan :

*“yang hendak kita persoalkan disini ialah kedudukan, soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Kaum konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita.”*

Pemikiran Hatta tersebut nampaknya masih relevan seperti yang terjadi saat ini. Hal ini bisa dilihat ketika petani mau panen harga dasar gabah jatuh, selain itu petani tidak mempunyai *bargaining position* dalam menentukan harga apalagi rakyat tidak berdaya menghadapi melambungnya harga saprodi. Oleh karena itu tidak salah apabila dikatakan bahwa petani hanya sebagai "tukang tander."

Struktur ekonomi kolonial yang menempatkan sektor ekspor bahan-bahan mentah sebagai sektor utama telah merupakan faktor yang bertanggung jawab bagi terbentuknya apa yang disebut *disarticulated socio-economic structure* dalam masyarakat Indonesia (Sritua Arif, 1993). Oleh karena itu secara tegas Hatta menolak untuk menjadikan sektor industri sebagai fondasi pembangunan. Menurut Hatta, strategi pembangunan hendaklah dilandasi oleh pengembangan sektor pertanian dan mejadikan sektor industri sebagai *offshoot* sektor pertanian. Disisi lain Hatta juga menolak untuk menjadikan sektor ekspor sebagai penentu arah pembangunan, namun pasaran dalam negeri yang ditopang oleh kekuatan daya beli domestik haruslah dijadikan sebagai penentu arah pembangunan (Sritua Arif, 1993).

Gunder Frank (dalam Sritua Arif, 1999) seorang pemikir strukturalis dari Dunia Ketiga membuat pembagian yaitu apa yang disebutnya negeri-negeri metropolis maju (*developed metropolitan country*) dan negeri-negeri satelit yang terbelakang (*satellite underdeveloped countries*). Frank menegaskan bahwa hubungan metropolis-satelit menyentuh keseluruhan sektor dalam negeri-negeri miskin dan malah keterbelakangan

sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalisme dunia yang masuk ke negeri-negeri miskin melalui sektor modern dalam negeri-negeri itu.

Berangkat dari teori tersebut, keberadaan "Lumbung Desa Modern" merupakan wahana kelembagaan yang dibentuk dari masyarakat sendiri untuk menjembatani antara produsen dan konsumen supaya petani akan terhindar dari lintah darat. Apabila kelembagaan ini dikembangkan akan bisa menyingkirkan kaum distributor (bangsa asing) yang mempunyai andil besar terjadinya kemelaratan dan keterbalakangan.

## PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT

Salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah *empowerment* atau pemberdayaan (Ife, 1995). Pemberdayaan berarti membantu komunitas dengan sumber daya, kesempatan, keahlian dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan masa depan warga komunitas.

Pemberdayaan ekonomi rakyat mutlak menghendaki koreksi yang fundamental dalam dialektika hubungan ekonomi yang ada sekarang di Indonesia dalam rangka suatu reformasi sosial yang mendasar. Selama itu tidak dilakukan, maka kehidupan ekonomi rakyat akan mengalami suatu proses involusi yang semakin lama semakin parah. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah bersifat bantuan sinterklas yang tidak akan berhasil meningkatkan posisi ekonomi rakyat ke posisi yang lebih tinggi secara substansial selama belunggu-belunggu struktural terus menghadangnya dalam suasana

dialektika hubungan ekonomi yang eksploitatif (Sritua Arif, 2002).

Kaitannya dengan reformasi sosial mutlak diperlukan kehadiran *an effective developmental state*, yaitu suatu elit kekuasaan yang mempunyai sifat dan perilaku sebagai berikut :

- a. Bebas dari kepentingan pihak manapun kecuali kepentingan rakyat banyak
- b. Bebas dari godaan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya
- c. Menganut suatu idiologi politik yang memihak rakyat banyak, pro kepada keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi integritas menghargai karya nyata dan *committed* terhadap emansipasi manusia untuk semua orang.
- d. Tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai suatu *soft-state*, yaitu suatu pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan yang menghambat proses transformasi sosial yang hakiki.
- e. Menjalankan suatu tatanan politik yang betul-betul demokratis dimana sistem *checks and balances* berjalan sehingga menimbulkan tradisi kebijakan publik yang bersih.
- f. Mempunyai kepemimpinan politik yang responsif dan *accountable* terhadap *political masters*, yaitu rakyat.
- g. Berani melaksanakan suatu reformasi sosial yang antara lain melakukan restrukturisasi penguasaan asset ekonomi, reformasi agrarian dalam rangka keadilan sosial (Sritua Arif, 2002)..

Disamping itu, pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomis tetapi juga nilai tambah sosial budaya (Korten dan Corner dalam Harry Hikmat, 2001). Rakyat menyimpan banyak potensi yang selama ini belum dikembangkan dan bahkan semakin terpinggirkan sejalan dengan kebijakan pembangunan selama ini. Pembangunan yang berpusat pada rakyat berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya Korten dan Corner dalam Harry Hikmat (2001) menyatakan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Lebih lanjut mereka mengemukakan tiga tema penting dalam perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu :

- a. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka.
- b. Kedasaran bahwa kendatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.
- c. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi

pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dengan mengacu tiga tema penting yang dikonsepsikan Korten dan Carner tadi, maka pembangunan yang berpusat pada rakyat ditempuh melalui strategi pemberdayaan secara mendasar berbeda jauh dari pendekatan-pendekatan pembangunan lainnya. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

Prinsip ini diterapkan baik secara formal maupun informal. Hal ini menunjukkan lebih dari sekedar membawa orang-orang menjadi bersama, tetapi melibatkan proses, mendorong orang-orang untuk bekerja sama, lebih bergantung satu sama lain dalam menyelesaikan sesuatu. Prinsip ini mencari cara di mana setiap orang dapat memberikan kontribusi dan menjadi dihargai oleh yang lain. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat mencakup penguatan interaksi sosial di tingkat komunitas, mengajak kebersamaan, menterjemahkan melalui dialog, pemahaman dan tindakan sosial. Pemberdayaan masyarakat membawa warga komunitas ke dalam kegiatan bersama, penyelesaian masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal.

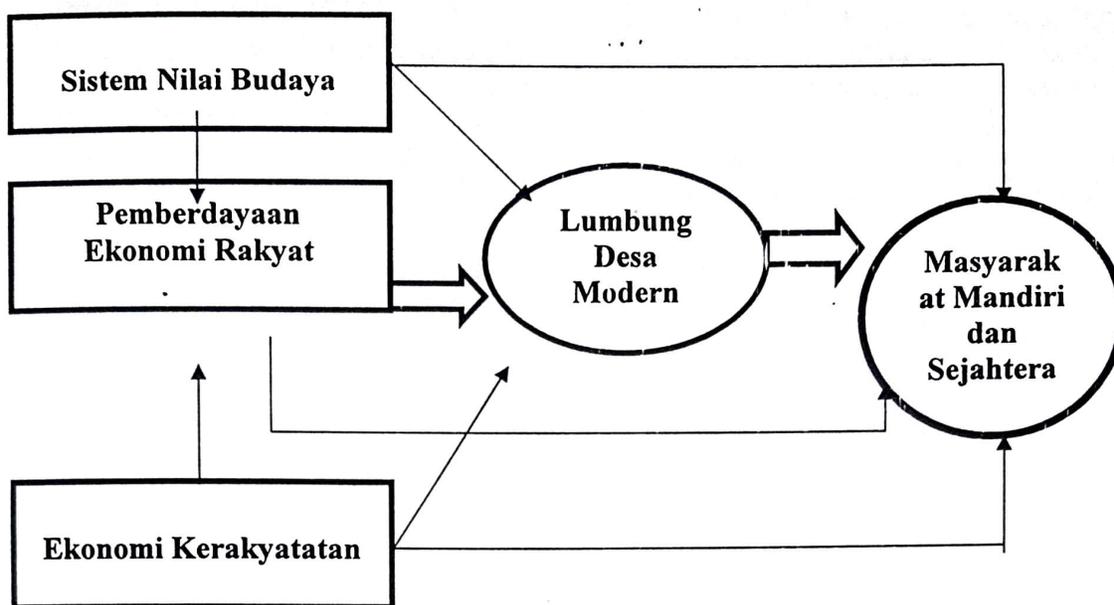
Ginjar Kartasmita dalam Gunawan Sumodiningrat (1997), menegaskan upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan. **Pertama**, menciptakan suasana

dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. **Kedua**,

memperkuat daya dan potensi yang dimiliki masyarakat. Ini berarti masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkan peluang yang ada. **Ketiga**, memberdayakan mengandung arti pula melindungi. Hal ini berarti masyarakat yang semakin lemah dan tidak berdaya harus dilindungi.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercapai apabila kemandirian telah terbentuk di masyarakat. "Lumbung Desa Modern" merupakan wahana atau kelembagaan lokal yang dibentuk masyarakat menuju kemandirian. "Lumbung Desa Modern" adalah salah satu budaya lokal yang telah ada sejak nenek moyang. Dengan sistem budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat dan tetap memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terbentuk "Lumbung Desa Modern" yang kokoh untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Lebih jelasnya dapat digambarkan skema sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Peran Lumbung Desa Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian, 2005. [www.depan.go.id/bsp/sarus/Pustaka/Program](http://www.depan.go.id/bsp/sarus/Pustaka/Program).
- Dove, Michael. R., 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. (Edisi terjemahan oleh Yayasan Obor Indonesia). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Gunawan Sumodiningrat, 1997. *Pemberdayaan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat : Kumpulan Esei Tentang Penanggulangan Kemiskinan*. PT. Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Harry Hikmat, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press. Bandung
- Ife, Jime. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analiysis and practice*. Melbourne : Longman.
- Mefi Hermawanti dan Hesti Rinandari, 2003. *Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat*.
- [http://ireyogya.org/adat/modul\\_modalsosial.htm](http://ireyogya.org/adat/modul_modalsosial.htm).

Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sritua Arif, 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan*

\_\_\_\_\_, 2002. *Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Di Indonesia : Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*. LP3ES. Jakarta.

Tony Luqman Lutony, 2005. [www.indonesia.nl/articles.php?rank=95&art\\_cat\\_id=46&status=archive](http://www.indonesia.nl/articles.php?rank=95&art_cat_id=46&status=archive) - 60k

*Ekonomi*. Lembaga Riset Pembangunan. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1999. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. CIDES. Jakarta.